

KEBIJAKAN PENDIDIKAN SEKOLAH PENDIDIKAN GURU (SPG) DAN IMPLEMENTASINYA DI YOGYAKARTA TAHUN 1967-1990

Peneliti 1 :Yeny Arista Oktaviani
Peneliti 2 : Dr. Dyah Kumalasari, M.Pd.
ariztharista1@gmail.com

ABSTAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Latar belakang kebijakan di dirikannya SPG , (2) Implementasi kebijakan pendidikan SPG di Yogyakarta tahun 1967-1990 dan (3) Dampak implementasi kebijakan pendidikan SPG di Yogyakarta tahun 1967-1990.

Penelitian ini menggunakan penelitian sejarah kritis dari Kuntowijoyo yang terdiri dari beberapa tahap. Tahap tersebut adalah (1) pemilihan topik, (2) heuristik, (3) verifikasi atau kritik sumber, (4) interpretasi, dan (5) historiografi.

Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut, (1) Latar belakang di dirikannya SPG karena adanya masalah pendidikan di Indonesia antara lain tingginya angka buta huruf, masalah daya tampung, kekurangan guru, dan masalah pemerataan pendidikan, (2) Implementasi kebijakan SPG di Yogyakarta di mulai sejak tahun 1967 dan mulai diperbanyak tahun 1970-an, kurikulum yang di gunakan adalah kurikulum SPG tahun 1968 dan tahun 1976 dengan menggunakan sistem pengajaran klasikal dalam bentuk konvensional, (3) Pemberlakuan kebijakan SPG ini memperoleh tanggapan dari masyarakat dan memberikan dampak positif pada bidang pendidikan, antara lain: angka buta huruf yang menurun, masalah daya tampung teratasi, pemerataan pendidikan dan terpenuhinya jumlah guru di setiap sekolah di Indonesia terutama di Yogyakarta.

Kata Kunci: Kebijakan Pendidikan, SPG, Implementasi di Yogyakarta

THE POLICY ON THE EDUCATION OF THE TEACHER EDUCATION SCHOOL (TES) AND ITS IMPLEMENTATION IN YOGYAKARTA IN 1967-1990.

Abstract

This study aims to investigate: (1) the background of the policy on the establishment of TES, (2) the implementation of the policy on the TES in Yogyakarta in 1967-1990, and (3) the impact of the implementation of the policy on the education of TES in Yogyakarta in 1967-1990.

The study employed the critical historical research by Kuntowijoyo consisting of several stages. The stages were: (1) topic selection, (2) heuristics, (3) verification or source criticism, (4) interpretation, and (5) historiography.

The results of the study were as follows. (1) The background of the establishment of TES was the existence of educational problems in Indonesia such as illiteracy rate, capacity problem, lack of teachers, and educational equity problem. (2) The implementation of the policy on TES started in 1967 and began to be expanded in 1970s and the curriculums implemented were the 1968 and 1976 TES curriculums by applying the whole class learning system in the conventional form. (3) The implementation of the policy on TES got responses from society and resulted in positive impacts on the field of education such as the fact that the illiteracy rate decreased, the capacity problem was solved, educational equity was attained and the number of teachers in each school in Indonesia, especially in Yogyakarta, was fulfilled.

Keywords: *Policy on Education, TES, Implementation in Yogyakarta.*

I. PENDAHULUAN

Awal tahun 1950, bentuk negara Indonesia adalah negara Federal dengan nama negara Republik Indonesia Serikat.¹ Bentuk negara Republik Indonesia Serikat pada waktu itu tidak menguntungkan bagi pemerintah Republik Indonesia. Sebagian besar wilayah negara Indonesia dikuasai oleh Belanda, bahkan Belanda tidak mengakui keberadaan negara Republik Indonesia.

Tahun 1955 merupakan pemilu pertama yang diselenggarakan oleh bangsa Indonesia. Pada saat itu, pemerintah telah berhasil menyusun kabinet sesuai dengan UUD Sementara 1950.² Akan tetapi, setelah pemerintah berjalan selama 4 tahun, lembaga-lembaga pemerintahan yang telah dibentuk tidak berjalan sesuai dengan tugasnya. Oleh karena itu, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang salah satu isinya adalah mengembalikan konstitusi ke UUD 1945.

Sejak dikeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dimulai era demokrasi terpimpin. Kekuasaan politik pada saat itu berada di bawah kekuasaan Soekarno, PKI dan angkatan darat. Suasana politik waktu itu berubah menjadi situasi yang tegang dan berujung pada pemberontakan PKI tahun 1965 sekaligus sebagai akhir dari kekuasaan demokrasi terpimpin.

Pada tahun 1961, pemerintah mencanangkan program wajib belajar.³ Program ini sebagai bentuk dukungan pemerintah kepada masyarakat dalam memperoleh pendidikan. Keinginan masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan sangat didukung oleh pemerintah.⁴ Hal ini sebagai perwujudan pemerintah pada pasal 31 UUD 1945 yang isinya bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan di suatu sekolah.

Banyaknya masyarakat yang ingin memperoleh pendidikan memunculkan masalah baru bagi pemerintah. Jumlah guru yang mengajar lebih sedikit di bandingkan jumlah siswanya. Pemerintah harus mencari solusi yang cepat dan tepat untuk mengatasi masalah ini. Oleh sebab itu pemerintah mendirikan Kursus Pengajar untuk Kursus Pengantar ke Kewajiban Belajar (KPKPKB) pada tahun 1951, dimana pelaksanaannya diselingi antara belajar dan mengajar selama 4 tahun.⁵ Dua tahun kemudian KPKPKB dinyatakan oleh pemerintah sebagai SGB .

Untuk memenuhi kebutuhan guru Sekolah Lanjutan maka pemerintah mendirikan Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama (PGSLP) sebanyak 26 buah pada tahun 1954/1955.⁶ Selain PGSLP, pemerintah juga mendirikan Sekolah Guru Taman Kanak-Kanak (SGTK), Sekolah Guru Pendidikan Djasmani (SGPD), Pendidikan Guru Pendidikan Luar Biasa (PGPLB), Sekolah Guru Kepandaian Putri (SGKP), dan Sekolah Guru Pendidikan Teknik (SGPT).

Mulai tahun 1961 Sekolah Guru Bantu (SGB) dihapuskan karena adanya upaya dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas guru Sekolah Rakyat (SR). Oleh karena itu, pemerintah menambah SGA⁷ untuk menghasilkan guru SR dan SMP. Pada awal tahun 1964 SGA berganti nama menjadi SPG (Sekolah Pendidikan Guru).⁸ Hampir sama dengan sekolah guru sebelumnya, SPG didirikan dengan tujuan untuk menciptakan guru-guru baik guru Taman Kanak-Kanak (TK) dan

¹ Mochtar Buchori, *Evolusi Pendidikan di Indonesia dari Kweekschool Sampai ke IKIP: 1852-1998*, (Yogyakarta: Insist Press, 2007), hlm. 78-79.

² Helius Sjamsuddin; dkk, *Sejarah Pendidikan Indonesia Zaman Kemerdekaan (1945-1966)*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993), hlm. 71.

³ *Ibid.* hlm. 75.

⁴ H. A. R. Tilaar, *50 Tahun Pembangunan Pendidikan Nasional 1945-1995: Suatu Analisis Kebijakan*, (Jakarta: Grasindo, 1995), hlm. 80.

⁵ Ary H. Gunawan, *Kebijakan-Kebijakan Pendidikan Edisi Revisi*, (Jakarta: Penerbit Rieneka Cipta, 1995), hlm. 47.

⁶ *Ibid.* hlm. 48.

⁷ Helius Sjamsuddin; dkk, *op. cit.*, hlm. 85.

⁸ *Ibid.*, hlm. 86.

Sekolah Dasar. Meskipun kebijakan mengenai SPG mulai dicanangkan pada tahun 1964, tetapi implementasi kebijakan SPG tersebut baru dilaksanakan terutama di daerah pada tahun 1967. Seperti di D. I. Yogyakarta SPG baru dilaksanakan pada tahun 1967⁹ dan pengembangannya baru dilaksanakan pada tahun 1973. Pada perkembangannya, SPG mengalami kemunduran. Peminat untuk masuk ke SPG semakin tahun semakin berkurang. Selain itu, adanya tuntutan kualitas pendidikan tenaga guru yang lebih tinggi dan tugas menghasilkan guru sepenuhnya dibebankan kepada IKIP/FKIP sehingga pada akhirnya tahun 1990 SPG dibubarkan.¹⁰

A. Kajian Pustaka

Latar belakang didirikannya sekolah guru adalah diberlakukannya UU No. 4 Tahun 1950, bahwa pendidikan merupakan hak rakyat dan pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan nasional. Selain itu, melalui Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 yang menyatakan bahwa propinsi memiliki wewenang untuk membangun dan menyelenggarakan Sekolah Dasar. Hal ini dilakukan sebagai salah satu cara untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam memperoleh pendidikan. Disamping itu, pemerintah juga menerapkan program wajib belajar 9 tahun. Pelaksanaan wajib belajar tersebut menghadapi masalah. Jumlah sekolah dan guru yang di didik belum memadai apabila wajib belajar tersebut di berlakukan. Guru-guru yang tersedia hanyalah guru lulusan dari sekolah-sekolah guru zaman kolonial saja. Oleh karena itu, diperlukan suatu jenis pendidikan guru secara massal yang disebut KPKPKB (Kursus Pengajar untuk Kursus Pengantar Kepada Kewajiban Belajar).¹¹

Masalah pendidikan di Indonesia yang juga harus segera di selesaikan adalah kurangnya tenaga pendidik atau guru di Indonesia. Selain kurangnya tenaga pendidik, pendidikan pada waktu itu juga dihadapkan pada situasi adanya politisasi dalam bidang pendidikan. Dimana kementerian P. P. dan K dipecah menjadi dua departemen, yaitu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (PDK) dan Departemen Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP).¹²

Memasuki masa Orde Baru, permasalahan pendidikan yang harus dihadapi oleh pemerintah yaitu menyediakan pendidikan guru yang bisa dengan cepat mencetak guru. Hal ini dipengaruhi oleh adanya instruksi dari Presiden Soeharto untuk mendirikan sekolah dasar sebanyak 6.000 SD sebagai upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan daya tampung.¹³ Upaya tersebut ternyata memunculkan masalah baru, yaitu kekurangan tenaga pendidik yang disebabkan oleh banyaknya sekolah yang di bangun. Oleh karena itu, pemerintah mulai mengembangkan pembangunan SPG yang sudah di canangkan sejak tahun 1964, namun pelaksanaannya di setiap daerah baru terlaksana mulai tahun 1967.

SPG yang di terapkan di Indonesia merupakan alih fungsi dari SGA pada tahun 1964. Perkembangan SPG hampir sama dengan SMEP, dimana pada tahun 1960-an di Indonesia terdapat 82 SPG. Jumlah ini menurun pada tahun 1961-1965 yang kemudian meningkat kembali saat itu menjadi 123 SPG.¹⁴ Pada saat di laksanakan kebijakan SPG, kurikulum yang digunakan adalah kurikulum SPG tahun 1968 yang kemudian di sempurnakan menjadi kurikulum SPG tahun 1976. Penggantian kurikulum ini berdasarkan keputusan Menteri P dan K RI tanggal 21

⁹Sejarah SMA Stella Duce tersedia dalam <http://sma-stega.tarakanita.or.id/sejarah-sekolah.html> diakses tanggal 22 Oktober 2015.

¹⁰ Helius Sjamsuddin, dkk., *loc. cit.*

¹¹ H. A. R. Tilaar, *op. cit.*, hlm. 79-81.

¹² Mochtar Buchori, *loc. cit.*

¹³ Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Noto Susanto (ed), *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI: Zaman Jepang dan Zaman Republik*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2011) , hlm. 581.

¹⁴ Helius Sjamsuddin, dkk, *op. cit.*, hlm. 91.

Juli 1976 no.0185/U/1976 tentang pembakuan Kurikulum SPG.¹⁵

Menjelang tahun 1980, SPG Negeri akan dikurangi.¹⁶ Hal ini disebabkan karena jumlah guru yang di butuhkan oleh sekolah-sekolah mulai tercukupi. Pada akhirnya SPG secara bertahap di alih fungsikan menjadi sekolah menengah atas lainnya. Alih fungsi tersebut di mulai pada tahun 1989 dan berakhir pada tahun 1990.¹⁷ Pada saat itu SPG di alih fungsikan menjadi SMA, SMK, STM, SKK dan sekolah menengah atas lainnya.

Mengingat SPG merupakan sekolah khusus untuk guru yang setingkat SMA, maka pemerintah mencanangkan berbagai program untuk meningkatkan kualitas guru lulusan SPG. Program-program tersebut diantaranya Pen-Lok, Radio Pendidikan, penataran guru dan P3G. Radio pendidikan merupakan program yang menarik, dimana guru diminta untuk mendengarkan materi di radio kemudian disajikan di sekolah.¹⁸

B. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian menurut Kuntowijoyo yang terdiri dari beberapa tahap yaitu, (1) pemilihan topic adalah menentukan topic yang akan dikaji, (2) Heuristik adalah pengumpulan sumber, (3) Verifikasi adalah menyaring sumber-sumber yang didapatkan agar ditemukan fakta yang sesuai, (4) Interpretasi atau menafsirkan sumber, (5) Historiografi yaitu penulisan sejarah.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti berkaitan dengan penelitian ini adalah pendekatan politik, pendidikan dan sosial. Pendekatan politik digunakan oleh penulis untuk mengkaji kebijakan pendidikan mengenai SPG. Menurut Miriam Budiardjo, politik merupakan berbagai macam kegiatan pada suatu sistem politik yang menyangkut proses dalam menentukan tujuan-tujuan dari sistem tersebut dan melaksanakannya.¹⁹ Pendekatan politik dalam proses implementasi kebijakan memungkinkan digunakannya paksaan dari kelompok dominan.²⁰ Menurut R.S. Peters dalam bukunya *The Philosophy of Education* menyatakan bahwa pada hakikatnya pendidikan tidak mengenal akhir karena kualitas kehidupan manusia terus meningkat.²¹ Pendekatan pendidikan digunakan oleh penulis untuk menelusuri sistem pengajaran yang diterapkan di SPG dan kurikulum yang dipakai. Pendekatan ini juga peneliti gunakan untuk mengkaji sekolah-sekolah guru yang pernah ada di Indonesia sebelum SPG. Pendekatan sosial menjadi pendekatan yang membantu peneliti dalam mengkaji dampak implementasi sekolah pendidikan guru di Yogyakarta. Pendekatan sosial menjadi pilihan, dikarenakan perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat dapat dipengaruhi oleh kemajuan pendidikan. Selain itu, perubahan sosial bukannya menjadi sumber kekacauan tetapi sumber kesadaran bermasyarakat dan bertanggung jawab.²² Sistem sosial selalu mengikuti perubahan-perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Akan tetapi, sistem sosial juga

¹⁵ Maman Achdiat, *Penelaahan Kurikulum SPG. 1976*, (Jakarta: P3G, 1980), hlm. 13.

¹⁶ C. E. Beeby, *Pendidikan di Indonesia: Penilaian dan Pedoman Perencanaan*, (Jakarta: LP3ES, 1981), hlm. 140.

¹⁷ Helius Sjamsuddin, dkk, *op. cit.*, hlm. 86.

¹⁸ Ary H. Gunawan, *op. cit.*, hlm. 71.

¹⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1980), hlm. 8.

²⁰ Arif Rohman, *Kebijakan Pendidikan: Analisis Dinamika Formulasi dan Implementasi*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), hlm. 115.

²¹ Nurani Soyomukti, *Teori-Teori Pendidikan: Tradisional, (Neo) Liberal, Marxis-Sosialis, Postmodern*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), hlm. 29.

²² Astrid S. Susanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: Penerbit Bima Cipta, 1983), hlm. 141.

dapat menolak perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat yang datang dari luar, baik dengan cara tetap memelihara maupun dengan melakukan perubahan-perubahan secara reaksioner.²³

II. LATAR BELAKANG KEBIJAKAN SEKOLAH PENDIDIKAN GURU

A. Masalah Pendidikan di Indonesia Tahun 1967-1990

Secara garis besar masalah pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia terdiri dari lima pokok masalah, yaitu masalah pemerataan pendidikan, daya tampung, kualitas pendidikan dan efisiensi serta efektifitas pendidikan. Memasuki zaman pasca kemerdekaan, masalah pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dari beberapa pokok pendidikan diatas adalah permasalahan pemerataan pendidikan dan masalah daya tampung. Permasalahan pendidikan ini muncul karena di dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa seluruh warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Oleh sebab itu, pemerintah harus menyediakan fasilitas pendidikan tanpa adanya deskriminasi paling tidak hingga ke jenjang pendidikan atas.

Masalah daya tampung pendidikan mulai muncul sejak tahun 1960-an. Kondisi ini diperparah dengan adanya fenomena *baby boom*²⁴ yang terjadi sejak tahun 1950 yang masalahnya baru dirasakan pada tahun 1970 hingga saat ini. Permasalahan daya tampung merupakan permasalahan yang berkaitan dengan jumlah anak usia sekolah yang tinggi dan tidak di imbangi dengan ketersediaan jumlah sekolah. Oleh sebab itu, tidak semua anak usia sekolah bisa di tampung masuk ke sekolah disekitarnya. Masalah lain yang juga harus diselesaikan oleh pemerintah adalah masalah buta aksara.

1. Masalah Pendidikan di Indonesia Tahun 1950-966

Masalah pendidikan yang harus dihadapi oleh pemerintah pada tahun 1950-an salah satunya adalah banyaknya masyarakat Indonesia yang masih mengalami buta aksara. Tingginya angka buta aksara yang dialami oleh masyarakat Indonesia membuat pemerintah mulai mencanangkan program pendidikan untuk memberantas masalah buta aksara tersebut. Berdasarkan pasal 30 Undang-Undang Dasar Sementara 1950 menyatakan bahwa tiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan dan tidak ada pembatasan kecuali pengawasan.²⁵ Pemerintah membangun sekolah dasar dengan cuma-cuma dengan harapan pendidikan dasar terbuka untuk setiap orang tanpa memandang kedudukan. Kebijakan pemerintah ini di sambut baik oleh masyarakat Indonesia. Anak-anak usia sekolah berbondong-bondong menuju sekolah di dekat rumahnya untuk memperoleh pendidikan.

Pada saat pemerintah telah menemukan solusi untuk menghadapi masalah daya tampung, maka muncul masalah baru. Banyaknya anak yang masuk ke sekolah tidak diimbangi dengan tenaga guru yang tersedia. Akibatnya, satu orang guru harus mengajar murid dengan jumlah melebihi kapasitas. Kekurangan tenaga pendidik ini juga disebabkan oleh kurangnya dana dari pemerintah untuk menyediakan pendidikan khususnya pendidikan guru dan menurunnya minat masyarakat untuk menjadi guru. Selain itu, gaji seorang guru tidak lagi memberikan penghidupan yang layak bagi guru tersebut.²⁶

²³ Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 19.

²⁴ Dampak dari *baby boom* ini tidak hanya mempengaruhi dalam bidang pendidikan saja, tetapi juga mempengaruhi bidang ekonomi dan sosial juga. Untuk lebih jelasnya lihat "Pengalaman pahit *baby boom* tahun 50-an", *Kedaulatan Rakyat*, 12 Maret 1985, hlm. 8.

²⁵ Selo Soemardjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1981), hlm. 21

²⁶ Helius Sjamsuddin, dkk, *Sejarah Pendidikan Indonesia Zaman Kemerdekaan (1945-1996)*, (Jakarta: Depdikbud, 1993), hlm. 100.

Sebagai solusi dalam mengatasi masalah diatas, pemerintah mulai mengeluarkan kebijakan untuk menambah tenaga pendidik. Konsentrasi pemerintah pada waktu itu adalah untuk memenuhi tenaga pendidik bagi pendidikan dasar. Hal itu mendapatkan penguatan kebijaksanaan dari pemerintah dengan dikeluarkannya Undang-Undang mengenai pendidikan. Sesuai dengan isi yang terkandung dalam Undang-Undang No. 4 tahun 1950 bahwa anak-anak yang berumur 6 tahun berhak dan yang berumur 8 tahun wajib memperoleh pendidikan sekolah dasar. Dukungan pemerintah terhadap pendidikan masyarakat Indonesia juga ditunjukkan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 yang isinya bahwa propinsi mempunyai wewenang untuk membangun dan menyelenggarakan Sekolah Dasar.²⁷

Langkah pemerintah untuk mengatasi kekurangan daya tampung tersebut dengan cara menyelenggarakan kursus-kursus untuk menambah pengetahuan umum masyarakat, menyelenggarakan perpustakaan dan menyelenggarakan perpustakaan rakyat. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan No. 5033/F tanggal 5 Juli 1950 didirikan lembaga pendidikan guru sementara dengan nama Kursus Pengajar untuk Kursus Pengantar kepada Kewajiban Belajar atau di singkat dengan KPKPKB.²⁸

KPKPKB yang didirikan oleh pemerintah di harapkan dapat menampung masyarakat yang menghendaki untuk sekolah. Alasan lain pendirian lembaga pendidikan ini adalah untuk mempercepat pemenuhan tenaga pendidik untuk sekolah dasar. Lahirnya KPKPKB di rasa efektif dan dapat dengan cepat mengatasi masalah kekurangan tenaga pendidik. Terbukti selama dua tahun KPKPKB didirikan sudah di bangun 400 KPKPKB dengan catatan lulusan yang cukup memuaskan.

Pada waktu yang bersamaan dengan di bentuknya lembaga pendidikan KPKPKB, didirikan pula kursu-kursus persamaan SGB dan SGA. Tujuan didirikannya kursus-kursus tersebut adalah untuk meningkatkan tenaga pendidikan. Pada perkembangannya kursus persamaan SGA dan SGB berubah menjadi SGA dan SGB. Sekitar tahun 1950, terjadi penambahan jumlah SGA dan SGB di seluruh wilayah Indonesia. Melalui perluasan tersebut dapat di katakan bahwa kemunduran pendidikan di zaman penjajahan Jepang telah teratasi. Pada tahun 1950-an, terdapat 226 SGB yang memiliki jumlah siswa sebanyak 108.454 dan 24 SGA dengan jumlah siswa sebanyak 11.416 siswa. Tahun 1955, terjadi penambahan jumlah SGA dan SGB, yaitu 539 SGB dengan jumlah siswa sebanyak 161.827 siswa dan SGA sebanyak 89 buah dengan jumlah siswa sebanyak 17.057 siswa.²⁹

Selain SGA dan SGB, pemerintah juga mendirikan KPKB (Kursus Pengantar Kewajiban Belajar).³⁰ Tujuan utama didirikannya KPKB tersebut adalah untuk memberantas buta huruf. Terbukti pada tahun 1952 dibangun 3.372 memiliki siswa sebanyak 500.000 orang.³¹ KPKB ini pada akhirnya menjadi embrio munculnya sekolah dasar. Hadirnya SPG di kalangan masyarakat, dapat membantu masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang layak. Hal itu juga merupakan salah satu jawaban atas permasalahan kurangnya tenaga pendidik pada lembaga pendidikan dasar.

2. Masalah Pendidikan di Indonesia Tahun 1967-1990

Memasuki era Orde Baru, seiring dengan terlaksananya Repelita I pada tanggal 1

²⁷ H. A. R. Tilaar, *50 Tahun Pembangunan Pendidikan Nasional 1945-1995: Suatu Analisis Kebijakan*, (Jakarta: Grasindo, 1995), hlm. 80.

²⁸ *Ibid.* hlm. 81.

²⁹ Mochtar Buchori, *op. cit.*, hlm. 94.

³⁰ H. A. R Tilaar, *op. cit.*, hlm. 82.

³¹ *Ibid.*

April 1969 yang telah berhasil mewujudkan usaha-usaha stabilitas di bidang politik dan ekonomi yang dilaksanakan sejak Oktober 1966. SPG mulai diperbanyak pada setiap wilayah. Hal ini sesuai dengan tujuan Repelita I yaitu meningkatkan taraf hidup masyarakat dan sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan dalam tahap-tahap berikutnya.³² Pada bidang pendidikan pelaksanaan Repelita I adalah dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden untuk membangun sekolah, terutama sekolah dasar. Sekolah Dasar Instruksi Presiden yang dibangun berdasarkan Instruksi Presiden sering disebut dengan SD Inpres.

Pembangunan gedung SD tersebut dimulai pada tahun anggaran 1974/1975 dengan rencana membangun 6.000 Sekolah Dasar tahap kedua.³³ Pembangunan tahap kedua ini merupakan kelanjutan dari Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1973 dan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1973. Dana yang digunakan untuk pembangunan diambil dari APBN Tahun Anggaran 1974/1975.

Pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar (Tahap Kedua) tidak hanya dengan pembangunan gedung untuk sekolah dasar, melainkan bersama kelengkapannya. Kelengkapan yang diberikan oleh pemerintah mengenai bantuan tersebut antara lain penyediaan guru, perabot sekolah dan buku-buku pelajaran pokok, selain penyediaan buku bacaan anak-anak untuk perpustakaan Sekolah Dasar yang sudah tersedia.³⁴ Pelaksanaan pembangunan sekolah dasar sudah dimulai sejak instruksi tersebut diterbitkan. Pembangunan gedung SD Inpres berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1973 dilaksanakan setiap propinsi dan kotamadya.

Pembangunan SD Inpres telah membawa dampak positif bagi masyarakat, terutama masyarakat pedesaan dan kota dengan penghasilan yang rendah. Mereka dapat merasakan pendidikan seperti teman-temannya yang lebih dulu sekolah di SD sekitarnya. Banyaknya pembangunan SD Inpres yang hampir seluruh wilayah Indonesia mengakibatkan kebutuhan guru yang semakin banyak. Oleh sebab itu, pemerintah juga mencanangkan untuk memperbanyak SPG agar target pemenuhan kebutuhan guru tersebut cepat tercapai.

B. Awal Munculnya Sekolah Pendidikan Guru

Sekolah khusus untuk guru sudah didirikan sejak zaman Hindia-Belanda. Sekolah Guru (Kweekschool) pertama didirikan di Solo pada tahun 1852³⁵ yang kemudian diikuti oleh Sekolah guru lainnya. Sekolah guru ini menghasilkan lulusan guru sebanyak 200 guru pada tahun 1887 dan 1892. Khusus untuk pendidikan tinggi, sekolah khusus guru yang pertama kali didirikan adalah Sekolah Guru Tinggi Hoogere Kweekshcool yang lamanya 3 tahun setelah Kweekschool atau Mulo.³⁶ Selain Hoogere Kweekshcool, Sekolah Guru Tinggi lain yang didirikan dengan nama yang bersifat barat adalah Hollandsch Inlandsche Kweekschool.³⁷

Seperti halnya pada era Orde Lama, Sekolah Guru (Kweekschool) dibangun karena pada zaman Hindia-Belanda terjadi kekurangan guru terutama bagi sekolah khusus pribumi. Mutu pendidikan pada waktu itu bisa dikatakan rendah, terutama di daerah luar Jawa. Hal ini

³²Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Noto Susanto (ed), *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI: Zaman Jepang dan Zaman Republik*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2011), hlm. 578.

³³BPAD DIY. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1974. Tentang Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar (Tahap Kedua).

³⁴BPAD DIY. Lampiran Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1974. Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar (Tahap Kedua).

³⁵S.Nasution, *Sejarah Pendidikan Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 40.

³⁶H.A.R. Tilaar, op. cit., hlm. 70.

³⁷Soegarda Poerbakawatja, *Pendidikan Dalam Alam Indonesia Merdeka*, (Djakarta: Gunung Agung, 1968), hlm. 165.

dikarenakan, pemerintah mengangkat guru secara cuma-cuma dan tanpa syarat khusus. Bahkan untuk mengatasi kekurangan guru pada tahun 1963, pemerintah memutuskan akan mengangkat guru tanpa pendidikan sebagai guru pada tahun 1892.³⁸ Pada akhirnya, tahun 1875 diadakan ujian masuk Kweekschool.

Bergantinya kekuasaan Belanda ke tangan Jepang pada bulan Maret 1942 telah mempengaruhi kebijakan mengenai pendidikan. Apabila pada zaman Hindia-Belanda kondisi pendidikan di Indonesia terkotak-kotak, lain halnya dengan kondisi pendidikan pada zaman pendudukan Jepang. Hadirnya Jepang di Indonesia telah membawa sistem baru bagi pendidikan. Khusus untuk sekolah guru, pemerintah Jepang menggabungkan sekolah guru pada pemerintahan Belanda yang terkotak-kotak menjadi satu sekolah. Pada saat itu pemerintah Jepang hanya membuka sekolah guru yang didirikan oleh pemerintah saja, sedangkan sekolah guru swasta ditutup dan tidak di ijin untuk di buka. Hanya perguruan Muhammadiyah dan Taman Siswa saja yang diperbolehkan untuk dibuka.

Sekolah Guru bentukan pemerintah Militer Jepang memiliki sistem yang unik, dimana ada peraturan pemisahan antara siswa laki-laki dan perempuan. Siswa laki-laki menempati Sekolah Guru Laki-laki atau sering dikenal sebagai SGL, sedangkan untuk perempuan menempati Sekolah Guru Perempuan atau dikenal sebagai SGP.³⁹ Lama belajar di kedua sekolah tersebut adalah 4 tahun. Selama siswa-siswa ini menempuh pendidikan di SGL dan SGP mereka tinggal di asrama.

Penerapan sistem asrama ini bertujuan untuk memudahkan pemerintah Jepang untuk mengontrol dan mendoktrin siswa. Melalui sistem asrama memudahkan pemerintah Jepang dalam menyelenggarakan program-program pendidikan yang menuntut partisipasi penuh dari siswa. Program-program pendidikan tersebut diantaranya latihan kemiliteran (*kyooren*), pengabdian masyarakat atau kerja bakti paksa (*kinroohooshi*), dan pendidikan jasmani.⁴⁰

Setelah Indonesia merdeka, sistem pendidikan mulai diubah menjadi sistem pendidikan nasional. Pada tahun 1950 dirumuskan Undang-Undang No 4 tahun 1950 mengenai Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran. Pada tahun 1954 dikeluarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 1954 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di sekolah, yang pokok isinya merupakan pemberlakuan kembali Undang-undang Nomor 4 tahun 1950.⁴¹ Adapun penyelenggaraan Undang-undang Nomor 4 tahun 1950 sejak Agustus 1950 untuk seluruh wilayah Indonesia dan berlaku untuk susunan sekolah negeri maupun swasta.

Susunan sekolah tersebut antara lain Sekolah Rakyat 6 tahun, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama 3 tahun dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 3 tahun. Khusus untuk sekolah guru, selain SGB 3 tahun dan SGA 6 tahun untuk mempersiapkan guru Sekolah Dasar/Rakyat didirikan pula PGSLP (Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama) satu tahun dan Kursus B-I dan B-II bagi guru Sekolah Lanjutan Atas yang masing-masing memiliki lama belajar 2 dan 4 tahun. Tahun 1954 didirikan PTPG (Pendidikan Tinggi Pendidikan Guru) yang merupakan Lembaga Pendidikan Guru setingkat universitas pertama di daerah Bandung.⁴² Pada perkembangannya lembaga-lembaga pendidikan guru diatas menjelma menjadi SPG dan IKIP.

III. IMPLEMENTASI SEKOLAH PENDIDIKAN GURU

A. Implementasi Kebijakan Sekolah Pendidikan Guru

Sistem pendidikan pada masa demokrasi terpimpin tidak terlepas dari pengaruh ideologi

³⁸ S. Nasution, loc. cit.

³⁹ Mochtar Buchori, op. cit., hlm. 28.

⁴⁰ *Ibid.* hlm. 29.

⁴¹ *Ibid.* hlm. 45.

⁴² *Ibid.* hlm. 46.

Manipol-USDEK . Pada saat itu, Presiden Soekarno mengenalkan Manipol-USDEK di segala tingkat pendidikan.⁴³ Bukan hanya dalam bidang pendidikan saja, ideologi tersebut di terapkan di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pada bidang pendidikan, Manipol-USDEK berpengaruh dalam tujuan pendidikan. Adapun tujuan pendidikan pada waktu itu adalah dengan menanamkan jiwa yang memiliki kepeloporan dalam membela dan mengembangkan Manipol-USDEK.⁴⁴ Oleh sebab itu, perubahan kurikulum di berlakukan. Pelajaran *Civics* (kewarganegaraan) menjadi pelajaran utama pada setiap jenjang pendidikan.

Adapun penerapan pelajaran *Civics* adalah dengan cara melaksanakan upacara bendera pada hari senin. Hal ini sesuai dengan instruksi dari Departemen PP dan K yang salah satu isinya yakni kewajiban untuk menyelenggarakan upacara bendera pada hari Senin dan penurunan bendera pada hari Sabtu.⁴⁵ Pada saat menjalankan upacara bendera, kepala sekolah diwajibkan untuk berpidato selama lima hingga sepuluh menit.

Ideologi Manipol Usdek juga diterapkan pada kurikulum SPG. Meskipun demikian, masyarakat yang berminat untuk masuk ke SPG. Bahkan SPG harus menolak siswa yang mendaftar ke SPG karena jumlah pendaftar melebihi kapasitas daya tampung. Pembatasan kuota yang dilakukan oleh SPG tersebut dipengaruhi oleh terciptanya pembelajaran yang efektif dan efisien. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan bahwa untuk mendapatkan penunjang belajar yang efektif dan efisien, maka pemerintah mengeluarkan kurikulum SPG tahun 1976. Salah satu isi dari kurikulum SPG tahun 1976 adalah pengaturan pembangunan gedung SPG beserta daya tampung, jumlah kelas, susunan kelas, perkiraan lulusan, luas sekolah, luas asrama, dan luas tanah. Oleh karena itu pemerintah membagi tipe-tipe SPG berdasarkan luas wilayah yang digunakan menjadi 4 tipe, yaitu SPG tipe A, tipe B, tipe C, dan tipe D.⁴⁶

SPG yang berkembang di Indonesia tidak hanya SPG Negeri saja, akan tetapi banyak juga SPG swasta yang didirikan oleh yayasan agama tertentu seperti SPG Muhammadiyah, SPG Kristen dan SPG Katholik. SPG Negeri yang didirikan di pusat kota juga membentuk SPG Filial⁴⁷ di setiap pelosok kabupaten maupun kota. Kemunculan SPG swasta dan filial ini adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pendidikan. Munculnya SPG swasta dan filial sebagai salah satu cara dalam mempercepat langkah pemerintah untuk mengatasi kekurangan jumlah tenaga pendidik bagi sekolah dasar. Bahkan pemerintah telah mencanangkan bahwa setiap kabupaten harus memiliki satu SPG Negeri.

Pemerintah mulai memikirkan kebijakan baru seiring dengan bertambahnya SPG Swasta di setiap daerah di Indonesia. Pemerintah mulai menerapkan penegerian SPG Swasta di berbagai daerah di Indonesia. Tujuan dari perubahan status SPG dari SPG Swasta menjadi SPG Negeri

⁴³ M. C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*, (Jakarta: Serambi, 2008), hlm. 553.

⁴⁴ Helius Sjamsuddin; dkk, *Sejarah Pendidikan Indonesia Zaman Kemerdekaan (1945-1966)*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993), hlm. 79.

⁴⁵ Helius Sjamsuddin, dkk, *op. cit.* hlm. 95.

⁴⁶ Pembagian jenis SPG tersebut disesuaikan antara jumlah siswa atau daya tampung siswa dengan jumlah sarana prasarana yang dimiliki oleh sekolah tersebut. Setiap tipe sekolah telah ditentukan daya tampungnya, jumlah kelas, susunan kelas, perkiraan lulusan, luas sekolah, luas asrama, dan luas tanah. Dalam Maman Achdiat, *Pelaksanaan Kurikulum SPG. 1976*, (Jakarta: P3G Depdikbud, 1980), hlm. 31.

⁴⁷ SPG Filial dapat diartikan juga sebagai SPG cabang yang dibangun di kabupaten dengan induk SPG di ibukota propinsi. Sebagai contoh SPG yang di bangun di Gunungkidul merupakan SPG Filial dari SPG di kota Yogyakarta, SPG Negeri Pontianak yang memiliki 2 SPG Filial yaitu SPG Negeri Mempawah dan SPG Negeri Menjalin yang dibangun di dua kecamatan yang berbeda. ANRI. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0562/O/1984 tentang Penuggalan Sekolah Pendidikan Guru.

adalah tercapainya kesempurnaan pendidikan.⁴⁸ Salah satu contoh sekolah guru yang dinegerikan adalah SGO Swasta Bima Nusa Tenggara Barat menjadi SGO Negeri Bima. Penegerian SGO Swasta Bima tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan daya tampung sekolah guru olahraga negeri sesuai dengan kebutuhan tenaga guru olahraga di Nusa Tenggara Barat.⁴⁹ Pada dasarnya pengubahan status sekolah guru tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sekolah guru. Melalui kebijakan penegerian, sekolah guru yang bersangkutan akan mendapatkan bantuan dari dana pemerintah untuk pengembangan sekolah guru yang bersangkutan.

Seiring dengan pengubahan status SPG Swasta menjadi SPG Negeri, bertambah pula jumlah SPG Negeri di Indonesia. Sebelum terjadi pengubahan status tersebut, jumlah SPG Negeri sudah banyak. Jumlah SPG bertambah banyak lagi ketika dicanangkannya kebijakan penegerian SPG Swasta. Oleh sebab itu, dengan alasan untuk meningkatkan daya tampung sekolah, pemerintah mengeluarkan kebijakan penunggalan Sekolah Pendidikan Guru.⁵⁰ Kebijakan penunggalan SPG ini di khususkan untuk Filial SPG Negeri. Filial SPG Negeri ditunggalkan menjadi SPG Negeri.

Sejak dikeluarkannya kebijakan penunggalan Filial SPG Negeri pada tahun 1984, jumlah SPG berangsur-angsur mulai menurun. Siswa yang masuk ke SPG pun juga berangsur-angsur menurun. Sebab lain yang mempengaruhi berkurangnya jumlah siswa/peminat SPG adalah adanya pengurangan jumlah SPG. Pengurangan ini dilaksanakan menjelang tahun 1980. Pengurangan ini dilaksanakan karena ada beberapa SPG yang memiliki murid sebanyak 60 orang.⁵¹ Hal ini sangat jauh dari jumlah optimum dalam menjalankan pendidikan yang efektif yaitu sebanyak 1300 orang.

Memasuki tahun 1989/1990 secara bertahap, SPG dialih fungsikan menjadi SMA, SMEA, STM atau Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) di bawah pengelolaan LPTK. Tujuan dari pengalih fungsian ini adalah sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan mutu pendidikan, salah satunya adalah dengan meningkatkan mutu guru. Selain itu, pengalih fungsian sekolah guru tersebut karena jumlah tamatan sekolah guru (SPG dan SGO) sudah memenuhi keperluan tenaga guru untuk Sekolah Dasar.⁵² Oleh sebab itu, perlu pengalih fungsian sekolah guru (SPG dan SGO) menjadi Sekolah Menengah Atas lainnya.

Kebijakan alih fungsi SPG dan SGO ini dilaksanakan secara bertahap. Pelaksanaannya dimulai pada tahun 1989/1990. Bagi siswa kelas II dan III tetap melanjutkan proses belajar mengajar hingga tahun ajaran 1991/1992.⁵³ Pada awal tahun ajaran 1989/1990, sudah dilaksanakan penerimaan siswa baru untuk jenis sekolah baru dan tidak menerima siswa untuk SPG dan SGO. Seluruh SPG dialih fungsikan pada tahun ajaran 1991/1992.⁵⁴

⁴⁸ ANRI. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 056 Tahun 1971 tentang Mengubah Status SPG Persiapan Negeri Pada Pilot Projek I Transad di Pontjowati Kabupaten Lampung Tengah Mendjadi SPG Negeri.

⁴⁹ ANRI. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0563/O/1984 tentang Penegerian Sekolah Guru Olahraga Swasta Pemda Bima Nusa Tenggara Barat.

⁵⁰ ANRI. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0562/O/1984 tentang Penunggalan Sekolah Pendidikan Guru.

⁵¹ C. E. Beeby, *Pendidikan di Indonesia: Penilaian dan Pedoman Perencanaan*, (Jakarta: LP3ES, 1981), hlm. 140.

⁵² ANRI. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0342/U/1989 tentang Alih Fungsi Sekolah Pendidikan Guru dan Sekolah Guru Olahraga menjadi Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Lain.

⁵³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Forum Pengawasan, No. 6 Th. II 1989 s/d No.14 th. IV 1991. hlm. 45.

⁵⁴ Redja Mudyahardjo, *op. cit*, hlm. 469-470.

B. Kurikulum dan Sistem Pengajaran

Kurikulum SPG berbeda dengan kurikulum untuk sekolah yang sederajat, dimana pada kurikulum SPG terdapat mata pelajaran keguruan. Mata pelajaran keguruan tersebut diberikan agar ketika lulus dari SPG, lulusan-lulusan SPG ini sudah siap untuk bekerja sebagai guru. Selama belajar di SPG, mereka di berikan pengajaran mengenai bagaimana menjadi seorang guru yang baik. Mata pelajaran yang diajarkan khusus untuk keguruan antara lain mata pelajaran didaktik metodik, ilmu perkembangan jiwa anak, dasar-dasar pendidikan dan teori pendidikan.

Kurikulum yang diterapkan untuk SPG adalah kurikulum SPG tahun 1968 yang kemudian diganti dengan kurikulum SPG tahun 1976. Pada literature yang lain, disebutkan bahwa sebelumnya juga diberlakukan kurikulum SPG tahun 1958.⁵⁵ Penggantian kurikulum tersebut dikarenakan kurikulum SPG 1968 sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Sesuai dengan keputusan Menteri P dan K RI tanggal 21 Juli 1976 no. 0185/U/1976 tentang pembakuan kurikulum, kurikulum SPG tahun 1976 mulai diberlakukan.⁵⁶

Perbedaan antara kurikulum SPG 1968 dengan kurikulum SPG 1976 hampir pada seluruh komponen kurikulum. Baik dari tujuan-tujuan-tujuan pendidikan, struktur program, sistem penyampaian, sistem evaluasi, GBPP, dan petunjuk pelaksanaan. Struktur program kurikulum 1968 menggunakan sistem pengajaran tahunan yang dibagi menjadi 3 catur wulan. Mata pelajaran yang ada pada kurikulum SPG 1968 dikelompokkan menjadi 3 kelompok mata pelajaran, yaitu kelompok pembinaan jiwa Pancasila, pembinaan pengetahuan dasar, dan pembinaan kecakapan khusus. Jurusan yang dibuka di SPG sesuai dengan kurikulum 1968 antara lain Jurusan Guru SD, Jurusan Guru TK, dan Jurusan Guru SLB.

Pada kurikulum SPG 1968, siswa juga mendapatkan kesempatan untuk praktik mengajar di sekolah sebanyak 5% dari keseluruhan program mata pelajaran. Waktu yang diperlukan untuk praktik mengajar tidak dibatasi. Perbandingan antara Pendidikan Umum, Pendidikan Keguruan, dan Pendidikan mata pelajaran di SD adalah 33: 25: 42. Praktik mengajar tidak menjadi tujuan utama, melainkan ilmu yang di dapat selama SPG dipersiapkan untuk melanjutkan ke perguruan Tinggi.

Berbeda dengan kurikulum SPG 1968, kurikulum SPG 1976 memiliki tujuan-tujuan pendidikan yang dirumuskan secara analitik dan terperinci dari tujuan umum ke tujuan khusus. Dapat dikatakan pula bahwa kurikulum SPG 1976 berorientasi pada tujuan. Struktur program kurikulum SPG 1976 menggunakan sistem semester dengan bahan pengajaran dalam satu semester merupakan satu kesatuan. Pada dasarnya, kurikulum SPG 1976 merupakan penyempurna kurikulum sebelumnya. Kurikulum ini mulai berlaku tahun 1977.⁵⁷ Program pelajaran dibagi menjadi 3 program yaitu program pendidikan umum, program pendidikan keguruan dan program pendidikan khusus. Menurut ketentuan kurikulum SPG 1976, jurusan yang dibuka sebanyak dua jurusan, yaitu Jurusan SD dan Jurusan TK.

Praktik mengajar bagi siswa sesuai dengan kurikulum SPG 1976 sebanyak 11% dari seluruh program pendidikan. Jumlah jam praktik dibatasi menjadi 400 jam pelajaran. Perbandingan antara Program Pendidikan Umum, Program Pendidikan Keguruan dan Program Pengajaran adalah 29:38:33. Ilmu dipertajam pada praktik keguruan. Hasil akhir dari keseluruhan pendidikan dan ilmu yang dipelajari selama di SPG adalah untuk kepentingan praktik. Secara garis besar, perbedaan antara kurikulum SPG tahun 1968 dengan kurikulum SPG tahun 1976 terletak pada dasar kurikulum tersebut. Dasar kurikulum SPG tahun 1968 adalah Falsafah Negara

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 468.

⁵⁶ Maman Achdiat, *Penelaahan Kurikulum SPG. 1976*, (Jakarta: P3G Depdikbud, 1980), hlm. 13.

⁵⁷ Redja Mudyahardjo, *loc. cit.*

Pancasila sesuai dengan Tap MPRS No. XXVII/1966, Bab II, Pasal 2.⁵⁸ Sistem pengajaran untuk SPG masih bersifat klasikal dalam bentuk konvensional, tetapi guru dan siswa sama-sama aktif. Hal ini dibuktikan dengan dibentuknya kelompok-kelompok belajar di dalam kelas.

C. SPG di Yogyakarta Tahun 1967-1990

SPG 1 dan SPG II Yogyakarta adalah salah satu SPG Negeri yang mulai beroperasi pada tahun 1967. Bangunan kedua SPG ini merupakan bangunan lama yang sudah ada sejak masa pemerintahan Hindia Belanda. Pada tahun 1897 gedung ini digunakan sebagai Kweekschool voor Inlandsche Onderwiizer (Sekolah calon Guru Jaman Belanda) atau Sekolah Raja. Selain itu, gedung ini merupakan gedung yang bersejarah, dimana dahulu pernah digunakan sebagai ajang Kongres Boedi Utomo yang pertama pada tanggal 3-5 Oktober 1908. Bangunan ini juga pernah digunakan sebagai HIK, SGL pada masa pendudukan Jepang, SGA/SGB pada tahun 1947 dan hingga pada akhirnya tahun 1967 SGA diubah menjadi SPG. Tahun 1970 SPG Negeri 1 Yogyakarta ditetapkan sebagai pusat latihan guru SD. Memasuki tahun 1989 SPG Negeri I Yogyakarta dialih fungsikan menjadi SMA 11 Yogyakarta hingga sekarang sedangkan untuk SGB sudah lama dialih fungsikan menjadi SMP 6 Yogyakarta.⁵⁹

SPG swasta yang dibangun di DIY antara lain SPG Sugiyo Pranoto (sekarang SMA Stella Duce) dibawah yayasan Katholik, SPG Sang Timur dibawah yayasan Tarakanita, SPG Muhammadiyah, SPG St Louis IX Sedayu dan SPG-SPG swasta lainnya. Pembangunan SPG swasta ini merupakan salah satu langkah untuk mempercepat dalam mengatasi masalah kekurangan guru yang terjadi pada waktu itu. Bahkan pemerintah telah menganjurkan setiap kabupaten minimal memiliki 1 SPG.

Pada pelaksanaannya, SPG-SPG yang dibangun di DIY sudah sesuai dengan tujuan awal dari pembangunan SPG. Membutuhkan waktu 3 tahun untuk bisa menghasilkan lulusan SPG. Hal ini dibuktikan bahwa SPG Muhammadiyah Piyungan yang berdiri pada tahun 1968 telah meluluskan siswa sebanyak 7 kali. Lulusan SPG Muhammadiyah Piyungan telah banyak bertugas di Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Bahkan ada yang bertugas di luar pulau Jawa seperti Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur.⁶⁰ Selain SPG Muhammadiyah Piyungan, SPG yang telah mengirimkan lulusannya ke luar propinsi DIY bahkan ke luar Jawa adalah SPG Transmigrasi 17 Yogya.⁶¹

Pada pelaksanaannya SPG di Daerah Istimewa Yogyakarta telah berhasil mengatasi masalah kekurangan guru. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya masyarakat DIY yang bisa mengenyam pendidikan. Selain itu, keberhasilan pelaksanaan SPG di DIY ditunjukkan dengan adanya permintaan pengiriman tenaga guru ke berbagai wilayah di Indonesia seperti Propinsi Kalimantan Selatan dan Propinsi Jawa Barat.⁶²

IV. DAMPAK IMPLEMENTASI SEKOLAH PENDIDIKAN GURU DI YOGYAKARTA TAHUN 1967-1990

A. Persepsi Masyarakat Mengenai Implementasi SPG

Kebijakan pendidikan SPG yang diterapkan oleh pemerintah mendapatkan tanggapan dari masyarakat. Tanggapan dari masyarakat mengenai kebijakan tersebut beragam, ada

⁵⁸ Helius Sjamsuddin, dkk, *op. cit.*, hlm. 81.

⁵⁹ SMA Negeri 11 Yogyakarta, Sejarah SMA Negeri 11 Yogyakarta. Tersedia pada <http://sma11jogja.sch.id/pages/read/sejarah-singkat>. Diakses pada tanggal 29 September 2015.

⁶⁰ BPAD DIY Daftar Pertelaan Arsip dan Biro Umum (Agenda) No. 2214. Tahun 1977, 1978 tentang permohonan tanah bekas Los Jepang untuk pembangunan gedung SPG Muhammadiyah Piyungan, Bantul.

⁶¹ Anonim. "SPG Transmigrasi 17 Yogya mentargetkan 115 lulusan", *Kedaulatan Rakyat*, 29 Januari 1985, hlm. 2.

⁶² BPAD DIY. Sekertariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Biro Personalia Nomor 136/UP/V-130/76. Tentang Kekurangan Calon Guru SD (Inpres 6/75) untuk Daerah Kalimantan Selatan.

masyarakat yang setuju dan mendukung kebijakan pendidikan tersebut, ada pula masyarakat yang mengkritisi kebijakan tersebut. Masyarakat menggunakan media masa sebagai alat untuk menyampaikan aspirasinya. Oleh karena itu, tidak jarang komentar masyarakat tersebut seringkali mendapatkan timbal balik dari pembaca yang lain. Rata-rata masyarakat mengkritisi masalah sistem pelaksanaan seperti kurikulum dan keahlian serta ada pula yang menyoroti kemampuan lulusan SPG tersebut.

Kurikulum yang berlaku selama SPG diselenggarakan menggunakan Kurikulum SPG 1968 dan kurikulum 1976. Bahkan literature yang lain menyebutkan bahwa SPG selama penyelenggaraannya SPG menggunakan kurikulum SPG 1958, kurikulum SPG 1968 dan kurikulum SPG 1976.⁶³ Penggantian kurikulum tersebut bukan tanpa alasan. Perbaikan mutu pendidikan hingga kurikulum yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman menjadi alasan penggantian kurikulum tersebut. Penggunaan kurikulum SPG tahun 1976 ini berdasarkan dengan SK MPK No. 0185/U/1976 tanggal 21 Juli 1976.⁶⁴

Kurikulum SPG tahun 1968 memiliki tujuan pendidikan lebih berorientasi pada bahan pengajaran, sedangkan kurikulum SPG tahun 1976 berorientasi pada tujuan. Orientasi yang dimaksud bahwa tujuan pendidikan dirumuskan secara analitik dan terperinci dari tujuan umum ke tujuan khusus. Adapun ciri-ciri yang dapat membedakan antara kurikulum SPG tahun 1976 dengan kurikulum sebelumnya terletak pada pendekatan, organisasi, struktur program, materi pelajaran, strategi pengajaran dan sistem evaluasi.⁶⁵

Pendapat lain mengenai kurikulum dikemukakan oleh bapak Achmad Sapari . Beliau berpendapat bahwa kurikulum yang berlaku di Indonesia tidak bisa bertahan lebih lama. Hal ini dikarenakan kurikulum harus disesuaikan dengan perkembangan iptek. Kemajuan iptek berlangsung secara terus menerus dan secara cepat. Oleh sebab itu, kurikulum harus mengikuti perkembangan iptek. Bahkan kurikulum yang berlaku saat ini tidak sesuai dengan kurikulum 5 tahun yang akan datang. Seperti halnya kurikulum SMA 1975 yang diperbaiki menggunakan kurikulum 1984, kurikulum SD, SMP 1975 dan SPG 1976 hendaknya diperbaiki juga.⁶⁶ Lebih lanjut bapak Achmad Sapari mengemukakan bahwa terdapat kelemahan pada kurikulum SD, SMP 1975 dan SPG 1976 yang harus diperbaiki.

Perbaikan pendidikan tidak hanya dalam kurikulum saja. Potensi guru dapat diupayakan untuk diperbaiki, karena guru merupakan pelaku utama ketika mengajar di dalam kelas. Upaya-upaya pengembangan potensi guru ini meliputi proyek percobaan Radio Pendidikan, proyek pendidikan guru, penataran guru, proyek pengembangan pendidikan guru (P3G) dan program akta V. Proyek percobaan radio pendidikan bertujuan untuk diketemukannya cara-cara yang efektif dari penggunaan radio untuk membantu kegiatan pendidikan.⁶⁷ Inovasi dari pemerintah ini dirasa efektif. Sebab, materi dan pedoman guru untuk program siaran radio pendidikan dikirim ke sekolah-sekolah. Para guru diminta untuk memberikan tanggapan mengenai siaran radio pendidikan yang berkaitan dengan persiapan, penyajian materi, tindak lanjut, dan sebagainya.⁶⁸ Oleh karena itu, siaran radio pendidikan dapat dipadukan dengan pelajaran di kelas.

⁶³ Redja Mudyahardja, *Pengantar Pendidikan: Sebuah Studi Awal Tentang Dasar-Dasar Pendidikan Pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009), hlm. 468.

⁶⁴ Suwardi dan Kadarisman, *Pedoman Penyelenggaraan SPG*, (Jakarta: Percetakan Offset, 1977), hlm. 21.

⁶⁵ Maman Achdiat, *Penelaahan Kurikulum SPG. 1976*, (Jakarta: P3G Depdikbud, 1980), hlm. 23.

⁶⁶ Achmad. Sapari, "Kapan Kurikulum SD, SMP, dan SPG mendapat perbaikan?", *Kedaulatan Rakyat*, 4 Januari 1985, hlm. 6.

⁶⁷ Ary H. Gunawan, *Kebijakan-Kebijakan Pendidikan*, (Jakarta: Penerbit Rienaka Cipta, 1995), hlm. 71.

⁶⁸ *Ibid.*

Usaha lain yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya perbaikan potensi guru adalah proyek pendidikan guru. Adapun tujuan dari proyek ini adalah dimilikinya lembaga pendidikan guru untuk segala jenis dan tingkat, baik bersifat in-service maupun pre-service yang terkoordinasi dalam suatu jaringan yang saling mengisi.⁶⁹ Upaya untuk meningkatkan pendidikan guru juga dilakukan dengan menyelenggarakan Proyek Pengembangan Pendidikan Guru (P3G) yang dimulai pada tahun 1977.⁷⁰ Proyek ini dipusatkan untuk pembinaan dan perbaikan kualitas pendidikan guru dengan berbagai cara. Upaya yang diusahakan dan dikembangkan oleh P3G adalah mengembangkan materi dan metodologi pengajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan melakukan Pen-Lok dosen-dosen IKIP, FIP-Fkg dan guru-guru SPG pada bidang studi Pendidikan, Matematika, IPA, IPS, dan Bahasa dengan cara menerapkan CBSA dan PGBK.

Permasalahan mengenai kurangnya potensi guru juga terjadi di daerah Yogyakarta. Hal ini dikarenakan kurangnya perhatian pemerintah terhadap potensi keguruan yang dimiliki oleh warga Yogyakarta. Oleh sebab itu, masyarakat mengeluarkan kritik kepada guru yang dinilai kurang profesional, tidak komunikatif, dan menguasai bidang studi (*subject matter*), kurang adaptif terhadap perkembangan jaman, kurang semangat mengajar, dan lain-lain.⁷¹ Kritik ini muncul sebagai akibat dari merosotnya lulusan lembaga pendidikan. Selain itu, lembaga pendidikan guru seperti SPG, IKIP, FKIP, FIP-Fkg dan sebagainya tidak luput dari kritik tersebut.

B. Dampak Dalam Bidang Pendidikan

Penerapan kebijakan pendidikan mengenai SPG telah membawa dampak positif bagi masyarakat Indonesia. Permasalahan-permasalahan mengenai pendidikan seperti tingginya angka buta huruf, daya tampung, pemerataan pendidikan dan kekurangan guru sudah bisa teratasi. Permasalahan buta huruf memang sudah terjadi sejak lama. Keterbelakangan pendidikan yang dialami oleh masyarakat Indonesia merupakan akibat dari masyarakat yang masih Buta Huruf. Oleh karena itu, pada saat bangsa Indonesia telah merdeka dan bebas dari penjajahan, langkah awal yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menyelenggarakan program Pemberantasan Buta Huruf (PBH). Langkah ini semakin terorganisasi ketika Kementerian PP dan K pada tahun 1946 dengan membentuk Bagian Pendidikan Masyarakat yang salah satu tugasnya adalah menyelenggarakan PBH.⁷² Pada tahun 1951, pemerintah juga mencanangkan 10 tahun Pendidikan Masyarakat yang salah satu tugasnya adalah mengadakan PBH.

Memasuki tahun 1970-an hingga tahun 1990, angka buta huruf di Indonesia mulai menurun. Berkurangnya angka buta huruf tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah melalui pemerataan pendidikan di Indonesia bisa dikatakan berhasil. Pemerataan pendidikan ini tidak terlepas dari peran Presiden Soeharto yang menginstruksikan pembangunan sekolah dasar di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan dengan menyelenggarakan SPG juga menjadi salah satu faktor berhasilnya upaya pemerintah untuk pemerataan pendidikan.

Pemerataan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah selain pembangunan gedung-gedung sekolah adalah dengan cara mengirimkan beberapa guru ke luar wilayah DIY. Bahkan pemerintah daerah yang kekurangan guru meminta untuk dikirimkan guru ke daerah tersebut. Kebanyakan yang dicari adalah guru dari lulusan SPG. Tentu saja, langkah ini disambut baik oleh masyarakat. Upaya tersebut juga bisa dimanfaatkan sebagai langkah masyarakat untuk pemerataan penduduk, karena guru yang bersangkutan harus menetap dalam jangka waktu

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 74.

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 82.

⁷¹ Supriyoko. "Uraian Pendapat bagi Para Wakil Rakyat", "Perlu Upaya Pengembangan Potensi Keguruan", *Kedaulatan Rakyat*, 10 Oktober 1987, hlm. 6.

⁷² Ary H. Gunawan, *op. cit.*, hlm. 59.

yang lama.

Permintaan mengenai pengiriman guru ke luar propinsi DIY dikakukan oleh gubernur Jawa Barat dan Kalimantan Selatan. Pada tahun 1976 lulusan SPG yang mendaftarkan diri menjadi gurudi Jawa Barat sebanyak 4740 orang, sedangkan yang dibutuhkan sebanyak 7040 lulusan SPG. Sehingga kekurangan lulusan SPG sebanyak 2300 orang.⁷³ Selain itu, pemerintah Propinsi DIY juga mempunyai SPG yang lulusannya khusus ditempatkan di daerah transmigrasi. SPG yang dimaksud adalah SPG Transmigrasi 17 Yogya. Lulusan dari sekolah tersebut bisa langsung menjadi guru di daerah transmigrasi.⁷⁴

Permintaan dan pengiriman SPG ke luar wilayah propinsi DIY menunjukkan bahwa lulusan SPG terutama dari DIY memiliki potensi keguruan yang lebih dibandingkan dengan daerah lain. Hal ini dipengaruhi oleh propinsi DIY yang sejak jaman penjajahan mendapatkan pendidikan yang cukup baik dibandingkan dengan daerah lain. Begitu juga dengan pendidikan keguruannya, sejak dahulu sudah didirikan sekolah bagi pendidikan guru. Pendidikan Guru dari Kweekschool, SGA, SGL, SGKP, SPG, hingga IKIP telah di bangun di tanah Sultan ini dan telah mencetak guru-guru yang cukup berkompeten. Maka tidaklah mengherankan apabila Yogyakarta dianggap sebagai kota pelajar dan mutu pendidikan di Yogyakarta bisa dikatakan lebih tinggi dari pada daerah-daerah lainnya.

V. KESIMPULAN

Pemberlakuan kebijakan pendidikan SPG dilatar belakangi oleh adanya masalah-masalah pendidikan yang terjadi di Indonesia yang sudah lama. Masalah-masalah pendidikan tersebut antara lain angka buta huruf masyarakat Indonesia yang tinggi, masalah pemerataan pendidikan, daya tampung sekolah yang masih kurang dalam menampung anak-anak usia sekolah yang hendak memperoleh pendidikan dan masalah kekurangan tenaga guru di setiap sekolah.

Permasalahan pendidikan yang berkaitan dengan daya tampung mulai muncul sejak tahun 1960-an. Pada saat itu terjadi baby boom sejak tahun 1950 yang masalahnya baru dirasakan pada tahun 1970 hingga saat ini. Permasalahan daya tampung merupakan permasalahan yang berkaitan dengan jumlah anak usia sekolah yang tinggi dan tidak di imbangi dengan ketersediaan jumlah sekolah.

Masalah lain yang harus di hadapi oleh pemerintah salah satunya adalah banyaknya masyarakat Indonesia yang masih mengalami buta aksara. Memasuki era Orde Baru dan terlaksananya Repelita I pada tanggal 1 April 1969, SPG mulai di perbanyak pada setiap wilayah. Hal ini sesuai dengan tujuan dari Repelita I yaitu meningkatkan taraf hidup masyarakat dan sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan dalam tahap-tahap berikutnya. Pada saat itu diberlakukan Instruksi Presiden untuk membangun Sekolah Dasar sebanyak 6.000 Sekolah Dasar di seluruh wilayah Indonesia.

SPG merupakan sekolah guru hasil alih fungsi dari SGA pada tahun 1964. Sejak saat itu, kebijakan mengenai SPG mulai diberlakukan. Meskipun SPG mulai diberlakukan sejak tahun 1964, namun pelaksanaan atau implementasi kebijakan SPG ini baru terlaksana tahun 1967. Pada tahun 1967, SPG mulai di dirikan di Daerah Istimewa Yogyakarta. pembangunan SPG di Yogyakarta masih terpusat di kota. Begitu juga di daerah-daerah lainnya di seluruh wilayah Indonesia.

Pada saat SPG masih berlaku, kurikulum yang digunakan adalah kurikulum SPG 1968 dan kurikulum SPG 1976. Pada awalnya SPG menggunakan kurikulum 1968, namun untuk meningkatkan

⁷³ BPAD DIY. Daftar Pertelaan Arsip dan Biro Umum (Agenda) No. 2858. Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tentang Pengisian Kekurangan Calon Guru Inpres 6/75, Lulusan SPG/KPG dari DIY untuk Jawa Barat tahun 1976.

⁷⁴ Anonim. "SPG Transmigrasi 17 Yogya Margetkan 115 Lulusan", *Kedaulatan Rakyat*, 29 Januari 1985, hlm. 2.

mutu pendidikan SPG maka di berlakukan kurikulum SPG 1976. Pada kurikulum tersebut, siswa mendapatkan kesempatan untuk praktik mengajar di sekolah yang ditunjuk untuk praktik selama 400 jam pelajaran atau 11% dari total mata pelajaran yang diambil. Kurikulum SPG 1976 ini juga menekankan pada keterampilan siswa dalam memberikan materi dan pelajaran.

Sistem pengajaran SPG pada waktu itu bersifat klasikal, namun masih konvensional. Metode yang di gunakan dalam sistem pengajaran adalah metode ceramah dan diskusi. Tenaga guru yang mengajar di SPG berasal dari lulusan SPG itu sendiri. Selain itu, tenaga guru SPG berasal dari guru yang ditunjuk oleh pemerintah dan guru SD yang ditunjuk untuk mengajar di SPG.

Pelaksanaan kebijakan pendidikan SPG di Indonesia sebagai program pemerintah telah menimbulkan tanggapan-tanggapan dari masyarakat. Masyarakat menilai bahwa kurikulum SPG yang berlaku pada saat itu, terutama kurikulum SPG 1976 masih terdapat kelemahan-kelemahan. Kelemahan-kelemahan itu muncul sebagai akibat dari tidak adanya pembaruan kurikulum setelah kurikulum 1976.

Selain itu, potensi guru yang ada di Indonesia mulai diperhatikan. Hal ini di karenakan guru-guru di Indonesia merupakan lulusan dari SPG, dan SPG merupakan sekolah guru yang setaraf dengan SMA. Jadi, masih perlu diasah kemampuannya dalam mendidik siswa. Oleh sebab itu, pemerintah hendaknya mencanangkan program yang bertujuan untuk meningkatkan potensi guru seperti proyek pendidikan guru, penataran guru, Pen-Lok, Radio Pendidikan, dan proyek pengembangan pendidikan guru (P3G).

Selain tanggapan-tanggapan dari masyarakat, pemberlakuan SPG di Indonesia telah membawa dampak positif bagi pendidikan. Permasalahan pendidikan seperti banyaknya masyarakat yang buta aksara sudah mulai menurun. Daya tampung dan permasalahan kekurangan guru juga sudah bisa di tekan. Berkurangnya masalah-masalah di atas menunjukkan bahwa pemerintah telah berhasil dalam melaksanakan kebijakan pemerataan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- [1] Arif Rohman. 2012. *Kebijakan Pendidikan: Analisis Dinamika Formulasi dan Implementasi*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- [2] Ary H. Gunawan. 1995. *Kebijakan-Kebijakan Pendidikan Edisi Revisi*. Jakarta: Penerbit Rieneka Cipta.
- [3] Astrid S. Susanto. 1983. *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Penerbit Bima Cipta.
- [4] Beeby, C. E. 1981. *Pendidikan di Indonesia: Penilaian dan Pedoman Perencanaan*. Jakarta: LP3ES.
- [5] Helius Sjamsuddin, et al. 1993. *Sejarah Pendidikan Indonesia Zaman Kemerdekaan (1945-1966)*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- [6] Maman Achdiat. 1980. *Penelaahan Kurikulum SPG. 1976*. Jakarta: P3G.
- [7] Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Noto Susanto (ed). 2011. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI: Zaman Jepang dan Zaman Republik*. Jakarta: Balai Pustaka.
- [8] Miriam Budiardjo. 1980. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- [9] Mochtar Buchori. 2007. *Evolusi Pendidikan di Indonesia dari Kweekschool Sampai ke IKIP: 1852-1998*. Jakarta: Insist Press.
- [10] Nasikun. 2011. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [11] Nurani Soyomukti. 2010. *Teori-Teori Pendidikan: Tradisional, (Neo) Liberal, Marxis-Sosialis, Postmodern*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- [12] Redja Mudyahardjo. 2009. *Pengantar Pendidikan: Sebuah Studi Awal Tentang Dasar-Dasar Pendidikan Pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

- [13] Ricklefs, M. C. 2008. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Jakarta: Serambi.
- [14] S. Nasution. 2011. *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- [15] Selo Soemardjan. 1981. *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- [16] Soegarda Poerbakawatja. 1968. *Pendidikan dalam Alam Indonesia Merdeka*. Djakarta: Gunung Agung).
- [17] Suwardi dan Kadarisman. 1977. *Pedoman Penyelenggaraan SPG*. Jakarta: Penerbit Offset.
- [18] Tilaar, H.A.R. 1995. 50 Tahun Pembangunan Pendidikan Nasional 1945-1995: Suatu Analisis Kebijakan. Jakarta: Grasindo.

Sumber Arsip:

- [19]ANRI. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0562/O/1984 tentang Penunggalan Sekolah Pendidikan Guru.
- [20]ANRI. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 056 Tahun 1971 tentang Mengubah Status SPG Persiapan Negeri Pada Pilot Projek I Transad di Pontjowati Kabupaten Lampung Tengah Mendjadi SPG Negeri.
- [21]ANRI. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0563/O/1984 tentang Penegerian Sekolah Guru Olahraga Swasta Pemda Bima Nusa Tenggara Barat.
- [22]ANRI. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0342/U/1989 tentang Alih Fungsi Sekolah Pendidikan Guru dan Sekolah Guru Olahraga menjadi Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Lain.
- [23]BPAD DIY. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1974. Tentang Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar (Tahap Kedua).
- [24]BPAD DIY. Lampiran Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1974. Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar (Tahap Kedua).
- [25]BPAD DIY Daftar Pertelaan Arsip dan Biro Umum (Agenda) No. 2214. Tahun 1977, 1978 tentang permohonan tanah bekas Los Jepang untuk pembangunan gedung SPG Muhammadiyah Piyungan, Bantul.
- [26]BPAD DIY. Sekertariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Biro Personalia Nomor 136/UP/V-130/76. Tentang Kekurangan Calon Guru SD (Inpres 6/75) untuk Daerah Kalimantan Selatan.
- [27]BPAD DIY. Daftar Pertelaan Arsip dan Biro Umum (Agenda) No. 2858. Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tentang Pengisian Kekurangan Calon Guru Inpres 6/75, Lulusan SPG/KPG dari DIY untuk Jawa Barat tahun 1976.

Majalah:

- [28]Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Forum Pengawasan, No. 6 Th. II 1989 s/d No.14 th. IV 1991. hlm. 45.

Surat Kabar:

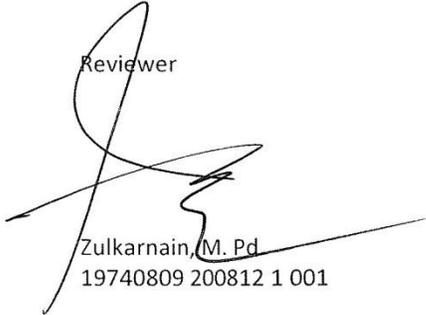
- [29]Achmad. Sapari, "Kapan Kurikulum SD, SMP, dan SPG mendapat perbaikan?", *Kedaulatan Rakyat*, 4 Januari 1985, hlm. 6.
- [30]Anonim. "Pengalaman pahit baby boom tahun 50-an", *Kedaulatan Rakyat*, 12 Maret 1985, hlm. 8.
- [31]Anonim. "SPG Transmigrasi 17 Yogya mentargetkan 115 lulusan", *Kedaulatan Rakyat*, 29 Januari 1985, hlm. 2.
- [32]Supriyoko. "Urunan Pendapat bagi Para Wakil Rakyat", "Perlu Upaya Pengembangan Potensi Keguruan", *Kedaulatan Rakyat*, 10 Oktober 1987, hlm. 6.

Internet:

[33] Sejarah SMA Stella Duce tersedia dalam <http://sma-stega.tarakanita.or.id/sejarah-sekolah.html> diakses tanggal 22 Oktober 2015.

[34] SMA Negeri 11 Yogyakarta, Sejarah SMA Negeri 11 Yogyakarta. Tersedia pada <http://sma11jogja.sch.id/pages/read/sejarah-singkat>. Diakses pada tanggal 29 September 2015.

Reviewer



Zulkarnain, M. Pd
19740809 200812 1 001

Menyetujui .

Yogyakarta, 22 Desember 2015

Pembimbing



Dr. Dyah Kumafasari, M.Pd.
19770618 200312 2 001